

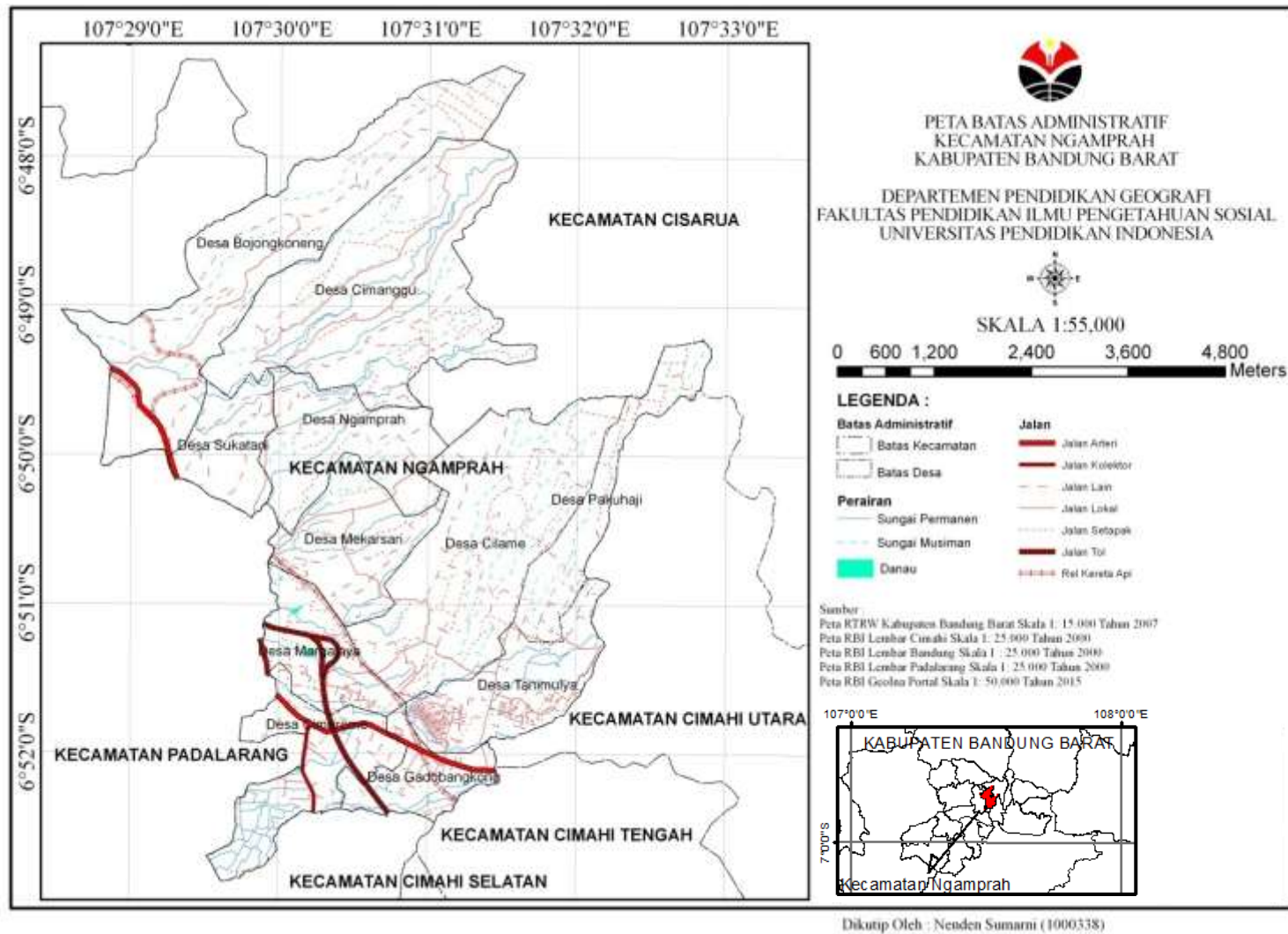
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Secara administratif Kecamatan Ngamprah berbatasan dengan Kecamatan Cisarua di sisi utara, Kecamatan Padalarang di sisi Barat, Kecamatan Cimahi Tengah (Kota Cimahi) di sisi selatan, dan Kecamatan Cimahi Utara (Kota Cimahi) di sisi timur. Luas Kecamatan Ngamprah secara keseluruhan adalah 36,01 Km² yang terdiri dari 11 (sebelas) desa yaitu Desa Cimoreme, Desa Gadobangkong, Desa Tanimulya, Desa Pakuhaji, Desa Cilame, Desa Margajaya, Desa Mekarsari, Desa Ngamprah, Desa Sukatani, Desa Cimanggu, dan Desa Bojongkoneng. Desa terluas di Kecamatan Ngamprah adalah Desa Cilame dan desa dengan luasan terkecil adalah Desa Margajaya.

Berdasarkan data Statistik Daerah tahun 2015, Kecamatan Ngamprah memiliki jumlah penduduk sebanyak 160.548 jiwa yang terdiri dari 81.461 jiwa penduduk laki-laki dan 79.087 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 36,01 Km² maka kepadatan penduduk Kecamatan Ngamprah mencapai 4.459 jiwa/Km². Desa Tanimulya merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Ngamprah yang mencapai 22,05 persen dari jumlah penduduk total kecamatan. Adapun sektor mata pencaharian penduduk di Kecamatan Ngamprah tergolong beragam. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor industri yaitu sebanyak 30,87 persen. Diikuti oleh sektor pertanian sebesar 16,28 persen, sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) dan jasa masing-masing sebesar 14,64 persen dan 14,05 persen. Selebihnya penduduk di Kecamatan Ngamprah bekerja pada sektor-sektor lain seperti konstruksi, penggalian, komunikasi dan pengangkutan. Mengingat hampir sebagian desa di Kecamatan Ngamprah sudah tergolong desa perkotaan, maka aspek sarana dan prasarana penunjang aktivitas penduduk seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian, penerangan jalan, tempat wisata, olahraga, informasi, telekomunikasi dan lembaga pemerintahan tergolong cukup lengkap dalam kondisi yang cukup memadai.



Gambar 3.1 Peta Administratif Kecamatan Ngamprah

B. Desain Penelitian

“Desain merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber daya dan data yang akan dipakai untuk diolah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian” (Umar, 2008, hlm. 23). Desain penelitian yang akan dilaksanakan termasuk pada kategori desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tidak memerlukan tahap analisis hubungan antara variabel dan indikator-indikator dalam penelitian. Penelitian hanya akan berfokus pada penjelasan akumulasi data-data yang ditemukan di lapangan. Konsep ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suryabrata (2012, hlm. 76) bahwa “penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi”.

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Creswell (2003, hlm. 153) metode survei berfokus pada “...*description of trends, attitudes, or opinions of a population by studying sample of that population. From sample results, the researcher generalizes or makes claims about the population*”. Berdasarkan definisi tersebut, metode survei berkaitan dengan deskripsi tentang tren, perilaku, dan pola dari populasi dengan mengkaji sampel dari populasi yang bersangkutan. Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian adalah deskripsi kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur yang ada di Kecamatan Ngamprah.

C. Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini meliputi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ngamprah dan berada di sekitar kawasan permukiman teratur. Adapun beberapa informan yang juga berperan sebagai partisipan di antaranya petugas Desa di Kecamatan Ngamprah, petugas Kecamatan Ngamprah, staf BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat, staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, staf Dinas Cipta Karya Kabupaten Bandung Barat dan pihak pengembang perumahan.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya memiliki satu variabel yakni kualitas hidup penduduk. Pembahasan mengenai kualitas hidup telah banyak dilakukan oleh peneliti dari berbagai sudut pandang keilmuan. Baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, maupun badan internasional sehingga memunculkan begitu banyak indikator kualitas hidup yang dapat menjadi acuan. Di antara indikator-indikator tersebut yang menjadi referensi bagi penulis adalah dari OECD (dalam Faturochman, 1990, hlm. 1), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS, Rahardjo (dalam Muchlis, 2010, hlm. 19), dan Eurostat (2015).

Tabel 3.1 Perbandingan Indikator Kualitas Hidup dari Berbagai Sumber

OECD⁽¹⁾	IPM⁽²⁾	Rahardjo⁽³⁾	Eurostat⁽⁴⁾
Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kondisi penghidupan
Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	Produktivitas atau aktivitas utama
Perumahan	Hidup Layak	Kemiskinan	Kesehatan
Kesempatan Kerja		Kesempatan Kerja	Pendidikan
Pendapatan		Keamanan Sosial	Rekreasi dan interaksi sosial
Stabilitas Sosial		Daya Dukung Lingkungan	Keamanan sosial
Lingkungan			Keterlibatan dalam pemerintahan dan organisasi

Sumber: ⁽¹⁾ OECD (dalam Faturochman, 1990); ⁽²⁾ Indeks Pembangunan Manusia BPS; ⁽³⁾ Rahardjo (dalam Muchlis, 2010, hlm. 19); ⁽⁴⁾ Eurostat (2015)

Berdasarkan Tabel 3.2 maka indikator kualitas hidup yang digunakan dalam penelitian ini diturunkan menjadi sub indikator sebagai berikut.

Tabel 3.2 Indikator Kualitas Hidup dalam Penelitian Ini

Indikator Penelitian				
Kesehatan	Pendapatan	Kemiskinan	Bangunan rumah	Keterlibatan dalam organisasi politik dan ekonomi
Pendidikan	Kesempatan kerja	Keamanan sosial	Rekreasi	Sumber air bersih

Sumber: Modifikasi dari berbagai Sumber dan Pengolahan Data (2017)

1. Kesehatan, berupa persentase responden yang terkena penyakit diare, gejala ISPA (yang ditandai dengan gejala-gejala seperti radang tenggorokan, sulit bernapas dan flu berat) dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebelum survei penelitian dilakukan, jarak fasilitas kesehatan terdekat dan kepemilikan asuransi kesehatan. Pengambilan kriteria kesehatan berupa penyakit diare dan gejala ISPA dirasa relevan dengan kondisi Kecamatan Ngamprah yang berlokasi dekat dengan daerah pusat Kota Cimahi dan berada dekat Kecamatan Padalarang yang merupakan daerah perkotaan dan memiliki kegiatan industri yang umumnya menimbulkan polusi udara. Sedangkan untuk penyakit diare dianggap relevan karena seringkali disebabkan oleh ketersediaan air bersih dan kebersihan lingkungan tempat tinggal penduduk setempat. Untuk sub indikator jarak fasilitas kesehatan terdekat dan kepemilikan asuransi kesehatan dinilai penting diterapkan dalam penelitian ini karena sangat terkait dengan penanganan penyakit yang dialami oleh penduduk.

2. Pendidikan, ditentukan dari persentase responden yang sudah berusia di atas 20 (dua puluh) tahun yang tamat SMA/ SMK. Kriteria ini muncul karena terkait dengan indikator kesempatan kerja. Asumsi yang digunakan adalah penduduk dengan pendidikan terakhir setingkat SD, SMP, dan SMA akan memiliki kesempatan kerja yang berbeda. Penduduk yang merupakan lulusan SD atau SMP biasanya memperoleh kesempatan kerja yang lebih sedikit dibanding lulusan SMA atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun hal lain yang dijadikan acuan adalah keikutsertaan responden dalam pendidikan informal seperti kursus, pelatihan, maupun penyuluhan. Pendidikan informal turut memberikan kontribusi bagi individu untuk memperoleh keterampilan (*skill*) sebagai nilai tambah.

3. Pendapatan, dilihat dari aspek penghasilan satu kepala keluarga yang diperoleh dalam waktu 1 (satu) bulan. Dalam penelitian ini, pendapatan akan dilihat dalam rupiah dan juga difungsikan untuk menggambarkan indikasi hidup layak. Adapun penentuan pendapatan ideal mengikuti standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) Jawa Barat 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep. 1322-Bangsos/2015 tentang UMK di Jawa Barat tahun 2016. Adapun UMK Kabupaten

Bandung Barat yang digunakan sebagai standar adalah sebesar Rp 2.250.000,- per bulan.

4. Kesempatan kerja, dinilai dari jenis pekerjaan responden dalam hal ini kepala keluarga yang bekerja di sektor formal maupun informal. Secara umum asumsi yang digunakan adalah pekerjaan di sektor formal misalnya sebagai karyawan dinilai memberikan pendapatan yang lebih memadai dibanding pekerjaan di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan jika penduduk yang bekerja di sektor informal lebih sejahtera dibanding sektor formal, namun melihat situasi di lapangan maka hal-hal seperti itu diabaikan. Pada indikator kesempatan kerja juga diambil data tentang lama kerja pada sektor formal/informal. Asumsi yang digunakan adalah semakin lama seseorang bekerja di bidang tersebut, maka pendapatan yang diperoleh dan posisi dalam pekerjaan akan lebih stabil.

5. Kemiskinan, dinilai dari besaran pengeluaran yang ditentukan melalui pendekatan pengeluaran rutin kebutuhan sehari-hari seperti pengeluaran untuk kebutuhan sembako, biaya penggunaan listrik (PLN), transportasi dan bahan bakar. Hal ini untuk melihat apakah responden mampu memenuhi kebutuhan dasar dari keluarganya dengan cukup atau tidak.

6. Keamanan sosial, ditentukan berdasarkan kondisi aman atau tidaknya lingkungan sosial tempat responden tinggal. Hal ini dilihat dari keberadaan lembaga atau petugas keamanan terdekat dan kejadian-kejadian kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal.

7. Bangunan rumah, dinilai dari jenis bangunan rumah tempat responden tinggal bersama anggota keluarganya. Jenis bangunan rumah ini dibedakan menjadi jenis bangunan rumah permanen, semi permanen, dan non permanen dengan kriteria rumah permanen memiliki atap berupa genteng, berdinding tembok dan berlantai semen atau keramik. Rumah semi permanen memiliki ciri dinding setengah

tembok dan setengah bambu, beratap genteng, asbes atau seng. Sedangkan rumah non permanen bercirikan berdinding kayu atau bambu, berlantai tanah dan beratap seng atau asbes. Bangunan rumah menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang karena merupakan bagian dari kebutuhan primer yaitu kebutuhan papan yang sifatnya harus segera dipenuhi.

8. Rekreasi dan interaksi sosial, dilihat dari frekuensi responden dalam melakukan rekreasi dalam 1 (satu) tahun terakhir dan frekuensi responden untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela di masyarakat.

9. Keterlibatan dalam organisasi politik serta lembaga ekonomi, dinilai dari partisipasi responden dalam kegiatan politik dan pemerintahan (seperti pemilu, partai politik, dan lainnya) serta partisipasi responden dalam lembaga ekonomi masyarakat (seperti koperasi, bank dan lainnya).

10. Ketersediaan sumber air bersih, dinilai dari sumber air bersih yang digunakan oleh responden untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air bersih yang digunakan dapat berasal dari sumur gali, sumur bor, atau PDAM. Penilaian terhadap ketersediaan air bersih ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan yang sehat dan layak.

Untuk mempermudah analisis data, maka dalam penelitian ini digunakan tabel skoring berdasarkan setiap indikator kualitas hidup yang sudah dirumuskan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Skoring Indikator Kualitas Hidup

No.	Indikator	Ukuran yang digunakan	Skor
1	Pendapatan	a. Responden yang penghasilan di bidang formal (karyawan), bidang informal (petani, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, ojek, pedagang dan lainnya) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang dari Rp 1.250.000,- ▪ Rp 1.250.000,- hingga Rp 2.250.000,- ▪ Lebih dari Rp 2.250.000,- 	1 2 3
2	Kesehatan	a. Angka sakit penderita penyakit diare, dinilai dari jumlah anggota keluarga responden yang	

Lanjutan Tabel 3.3

		<p>mengalami sakit diare dalam 3 (tiga) bulan terakhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada yang sakit diare ▪ 1 (satu) anggota keluarga mengalami sakit diare ▪ Lebih dari 1 anggota keluarga mengalami sakit diare <p>b. Angka sakit penderita penyakit ISPA, dinilai dari jumlah anggota keluarga responden yang mengalami sakit ISPA dalam 3 (tiga) bulan terakhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada yang sakit ISPA ▪ 1 (satu) anggota keluarga mengalami sakit ISPA ▪ Lebih dari 1 anggota keluarga mengalami sakit ISPA <p>c. Jarak fasilitas kesehatan dan tenaga medis di sekitar tempat tinggal penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang dari 1 Km ▪ 1 Km hingga 3 Km ▪ Lebih dari 3 Km 	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
3	Kemiskinan	<p>a. Pengeluaran sehari-hari untuk makan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang dari Rp 20.000,- ▪ Rp 20.000,- hingga Rp 50.000,- ▪ Lebih dari Rp 50.000,- <p>b. Pengeluaran untuk bahan bakar per bulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang dari Rp 100.000,- ▪ Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- ▪ Lebih dari Rp 200.000,- <p>c. Pengeluaran untuk biaya listrik per bulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang dari Rp 100.000,- ▪ Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- ▪ Lebih dari Rp 200.000,- 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4	Pendidikan	<p>a. Pendidikan terakhir responden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamat SD/ Putus sekolah ▪ Tamat SMP ▪ Tamat SMA/SMK atau PT <p>b. Partisipasi dalam pendidikan informal (kursus/pelatihan/penyuluhan):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ya ▪ Tidak 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>1</p>

Lanjutan Tabel 3.3

5	Kesempatan kerja	a. Sektor pekerjaan yang dimiliki oleh responden (formal/ informal):	
		▪ Informal (buruh, pedagang, petani, dan lainnya)	1
		▪ Formal (karyawan)	3
		b. Lama kerja responden yang bekerja di bidang formal (karyawan), bidang informal (petani, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, ojek, pedagang dan lainnya)	
6	Bangunan rumah	▪ Kurang dari 1 tahun	1
		▪ 1 – 5 tahun	2
		▪ Lebih dari 5 tahun	3
		a. Jenis bangunan rumah yang dihuni:	
		▪ Non permanen	1
		▪ Semi permanen	2
7	Rekreasi dan interaksi sosial	▪ Permanen	3
		b. Status kepemilikan bangunan rumah	
		▪ Hak milik pribadi	3
		▪ Sewa/ Kontrak	2
		▪ Lainnya	1
		a. Frekuensi responden dalam melakukan rekreasi dalam 1 (satu) tahun terakhir:	
8	Keamanan sosial	▪ Sering	3
		▪ Jarang	2
		▪ Tidak pernah	1
		b. Frekuensi responden untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela di masyarakat:	
		▪ Sering	3
		▪ Jarang	2
		▪ Tidak pernah	1
		c. Keikutsertaan dalam komunitas atau lembaga relawan	
		▪ Ya	3
		▪ Tidak	1
		a. Keberadaan lembaga/ petugas keamanan di sekitar tempat tinggal responden	
		▪ Ada	3
		▪ Tidak ada	1
		b. Frekuensi tindak kriminalitas di sekitar tempat tinggal responden:	
		▪ Sering	1
		▪ Jarang	2

Lanjutan Tabel 3.3

		▪ Tidak pernah	3
9	Keterlibatan dalam pemerintahan, organisasi politik, dan ekonomi	a. Frekuensi responden dalam mengikuti kegiatan pemilu (kepala desa, kepala daerah, atau pilpres) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selalu ▪ Jarang ▪ Tidak pernah b. Partisipasi responden dalam partai politik <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ya ▪ Tidak c. Partisipasi responden dalam lembaga pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ya ▪ Tidak d. Partisipasi responden dalam lembaga pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ya ▪ Tidak 	3 2 1 3 1 3 1 3 1
10	Ketersediaan sumber air bersih	a. Sumber air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumur gali/ sumur bor ▪ PDAM ▪ Lainnya 	3 2 1

Sumber: Modifikasi dari berbagai Sumber dan Pengolahan Data (2017)

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Silalahi (2012, hlm. 253), “populasi adalah seluruh unit yang darinya sampel dipilih”. Sedangkan populasi menurut Sugiyono (2011, hlm. 61) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. Dengan demikian, populasi dapat disimpulkan sebagai keseluruhan sampel dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, populasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu populasi permukiman teratur dan populasi manusia. Populasi permukiman teratur adalah seluruh permukiman teratur yang ada di wilayah administratif Kecamatan Ngamprah. Sedangkan populasi manusia meliputi seluruh Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di semua wilayah

desa di Kecamatan Ngamprah yang dijumpai permukiman teratur di dalamnya. Data jumlah Kepala Keluarga (KK) dan permukiman teratur yang menjadi populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Permukiman Teratur per Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

No.	Nama Desa	Jumlah	
		Kepala Keluarga ⁽¹⁾	Permukiman Teratur ⁽²⁾
1	Cimareme	3.074	1
2	Gadobangkong	3.588	1
3	Tanimulya	8.339	8
4	Pakuhaji	2.247	1
5	Cilame	8.444	7
6	Margajaya	4.076	2
7	Mekarsari	3.155	1
8	Ngamprah	1.798	-
9	Sukatani	1.987	-
10	Cimanggu	1.996	-
11	Bojongkoneng	4.151	-
Jumlah		42.855	21

Sumber: ⁽¹⁾ Kecamatan Ngamprah dalam Angka, 2015

⁽²⁾ Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, 2015

Berdasarkan data Tabel 3.4 jumlah penduduk di Kecamatan Ngamprah paling banyak terdapat di wilayah Desa Cilame. Populasi permukiman teratur untuk penelitian ini berjumlah 21 (dua puluh satu). Dikarenakan permukiman teratur hanya dijumpai di 7 (tujuh) desa yaitu Desa Cimareme, Desa Gadobangkong, Desa Tanimulya, Desa Pakuhaji, Desa Cilame, Desa Margajaya, dan Desa Mekarsari maka jumlah total Kepala Keluarga (KK) yang menjadi populasi dalam penelitian ini hanya diambil dari kelima desa tersebut dan berjumlah 32.923 KK.

2. Sampel

Sugiyono (2011, hlm. 62) mengemukakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki

ciri tertentu dan diambil dengan teknik pengambilan sampel tertentu pula. Berdasarkan konsep tersebut, dalam penelitian ini sampel yang akan ditentukan meliputi sampel permukiman teratur dan sampel penduduk.

a. Sampel Permukiman Teratur

Sampel permukiman ditentukan berdasarkan teknik *cluster sampling*. Menurut Bhattacharjee (2012, hlm. 68) bahwa “*if you have a population dispersed over a wide geographic region, it may be reasonable to divide the population into clusters (usually along geographic boundaries), randomly sample a few clusters and measure all units within that clusters*”. Sampel permukiman teratur yang diambil sebelumnya dikelompokkan berdasarkan desa yang menjadi lokasi dari masing-masing permukiman teratur berada.

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan persamaan Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan kepercayaan 90% sebagai berikut (Aida, dalam Mainaki 2014, hlm. 32).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel permukiman teratur
- N : Jumlah populasi permukiman teratur
- e : Nilai kesalahan yang masih bisa ditolerir 10%
dan tingkat kepercayaan 90%
- 1 : Nilai konstanta

Berdasarkan rumus di atas jumlah sampel permukiman teratur yang diambil dalam penelitian yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{21}{1 + 21 (0,1)^2} = \frac{21}{1 + 21 (0,01)} = \frac{21}{1,21} = 17,35 \text{ dibulatkan menjadi } 17$$

Melalui hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel permukiman teratur yang diperoleh adalah 17 permukiman teratur dengan sebaran sebagai berikut:

Desa Cimareme	$= \frac{1}{21} \times 17 = 0,81$ atau 1 permukiman teratur
Desa Gadobangkong	$= \frac{1}{21} \times 17 = 0,81$ atau 1 permukiman teratur
Desa Tanimulya	$= \frac{8}{21} \times 17 = 6,47$ atau 6 permukiman teratur
Desa Pakuhaji	$= \frac{1}{21} \times 17 = 0,81$ atau 1 permukiman teratur
Desa Cilame	$= \frac{7}{21} \times 17 = 5,67$ atau 6 permukiman teratur
Desa Margajaya	$= \frac{2}{21} \times 17 = 1,41$ atau 1 permukiman teratur
Desa Mekarsari	$= \frac{1}{21} \times 17 = 0,81$ atau 1 permukiman teratur

b. Sampel Penduduk

Untuk menentukan sampel manusia, peneliti memilih teknik *accidental sampling* atau sampel kebetulan. Menurut Kriyantono (2012, hlm. 35) teknik *accidental sampling* adalah “memilih siapa saja yang dijumpai untuk dijadikan sampel”. Etikan, dkk (2016, hlm. 2) menjelaskan bahwa teknik sampel kebetulan “...is a sampling where members of the population that meet certain practical criteria, such as easy accessibility, geographical proximity, availability at a given time, or the willingness to participate are included for the purpose of the study”. Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti menentukan sampel manusia dengan mencari responden yang sesuai dengan karakteristik sampel yang sebelumnya ditentukan yakni Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di sekitar permukiman teratur yang sudah ditetapkan sebagai sampel permukiman dalam radius terjauh 750 meter dari permukiman terdekat. Adapun penentuan rentang 250 meter ini berdasarkan temuan penelitian-penelitian sosial sebelumnya dengan menggunakan metode *buffering* di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada radius 0 - 250 meter seringkali ditemukan pengaruh yang signifikan dari suatu fenomena sosial (Cook, dkk., 2011, hlm. 5; Portnov, dkk., 2012, hlm. 1; Troy, dkk., 2016, hlm. 86). Adapun radius terjauh 750 meter dianggap ideal untuk membuat penelitian tetap fokus dengan hasil yang akurat. Dalam penelitian ini responden juga harus memenuhi kriteria sebagai penduduk yang ditentukan oleh BPS, yakni mereka yang berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka

yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Untuk jumlah sampel penduduk ditentukan berdasarkan rumus Dixon dan B. Leach (dalam Tika, 2005, hlm. 25).

Sebelum menentukan jumlah sampel yang akan diambil, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan persentase karakteristik (p) untuk menghitung variabilitas. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut.

1) Menentukan Persentase Karakteristik (p)

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$p = \frac{32.923}{160.548} \times 100\%$$

$$p = 20,50 \%$$

2) Menentukan Variabilitas (V)

Jumlah sampel yang akan diambil dapat diperoleh setelah menentukan variabilitas. Adapun hasil perhitungan variabilitas untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$V = \sqrt{p(100 - p)}$$

Sumber: Dixon dan B. Leach (dalam Tika, 2005, hlm. 25)

Keterangan:

P : Persentase karakteristik sampel yang dianggap benar

C : *Confidence limit*/ batas kepercayaan (%)

$$V = \sqrt{p(100 - p)}$$

$$V = \sqrt{20,50(100 - 20,50)}$$

$$V = \sqrt{20,50(79,5)}$$

$$V = \sqrt{1.629,75}$$

$$V = 40,37$$

3) Menentukan Jumlah Sampel (n)

$$n = \left[\frac{Z \times V}{C} \right]^2$$

Dixon dan B. Leach (dalam Tika, 2005, hlm. 25)

Keterangan:

n : Jumlah sampel Kepala Keluarga (KK)

Z : *Confidence level* untuk 95% adalah 1,96%

V : Variabel yang dapat diperoleh

C : *Confidence limit*/ batas kepercayaan yang diambil yaitu 10%

$$n = \left[\frac{Z \times V}{C} \right]^2$$

$$n = \left[\frac{1,96 \times 40,37}{10} \right]^2$$

$$n = \left[\frac{79,12}{10} \right]^2$$

$$n = [7,912]^2$$

$$n = 56,90$$

Untuk menghitung jumlah sampel sebenarnya, jumlah sampel (n) yang sudah diperoleh harus dikoreksi dengan rumus sebagai berikut.

$$n' = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

Dixon dan B. Leach (dalam Tika, 2005, hlm. 25)

Keterangan : n' = Jumlah sampel yang telah dikoreksi

n = jumlah sampel yang dihitung berdasarkan rumus

N = jumlah populasi (kepala keluarga)

Hasil perhitungan yang didapatkan setelah dikoreksi antara lain sebagai berikut.

$$n' = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

$$n' = \frac{56,90}{1 + \frac{56,90}{32.923}}$$

$$n' = \frac{56,90}{1,00173}$$

$n' = 56,8$ dibulatkan menjadi 57

Dengan demikian jumlah sampel Kepala Keluarga (KK) yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 57 Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di sekitar permukiman teratur yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sampel Kepala Keluarga (KK) tersebut tersebar di 7 desa dengan rumus berikut:

a) Desa Cimoreme jumlah KK 3.074, sehingga persentasenya yaitu:

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Setiap Desa}}{\text{Jumlah Populasi Kepala Keluarga}} \times n' = \frac{3.074}{32.923} \times 57 = 5,32$$

b) Desa Gadobangkong jumlah KK 3.588, sehingga persentasenya yaitu:

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Setiap Desa}}{\text{Jumlah Populasi Kepala Keluarga}} \times n' = \frac{3.588}{32.923} \times 57 = 6,21$$

c) Desa Tanimulya jumlah KK 8.339, sehingga persentasenya yaitu:

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Setiap Desa}}{\text{Jumlah Populasi Kepala Keluarga}} \times n' = \frac{8.339}{32.923} \times 57 = 14,43$$

d) Desa Pakuhaji jumlah KK 2.247, sehingga persentasenya yaitu:

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Setiap Desa}}{\text{Jumlah Populasi Kepala Keluarga}} \times n' = \frac{2.247}{32.923} \times 57 = 3,89$$

e) Desa Cilame jumlah KK 8.444, sehingga persentasenya yaitu:

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Setiap Desa}}{\text{Jumlah Populasi Kepala Keluarga}} \times n' = \frac{8.444}{32.923} \times 57 = 14,61$$

f) Desa Margajaya jumlah KK 4.076, sehingga persentasenya yaitu:

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Setiap Desa}}{\text{Jumlah Populasi Kepala Keluarga}} \times n' = \frac{4.076}{32.923} \times 57 = 7,05$$

g) Desa Mekarsari jumlah KK 3.155, sehingga persentasenya yaitu:

$$p = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Setiap Desa}}{\text{Jumlah Populasi Kepala Keluarga}} \times n' = \frac{3.155}{32.923} \times 57 = 5,46$$

Hasil penghitungan sampel dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Komposisi Jumlah Sampel Kepala Keluarga (KK) per Desa

No.	Desa	Jumlah KK	Jumlah Sampel KK
1	Cimareme	3.074	5
2	Gadobangkong	3.588	6
3	Tanimulya	8.339	14
4	Pakuhaji	2.247	4
5	Cilame	8.444	15
6	Margajaya	4.076	7
7	Mekarsari	3.155	6
Jumlah		32.923	57

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017)

F. Definisi Operasional

Keberadaan definisi operasional dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Definisi operasional dapat membatasi penafsiran pembaca mengenai isi dari sebuah penelitian dan mempermudah dalam memahami informasi penelitian secara tepat tanpa adanya penafsiran ganda maupun salah tafsir.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Tika (2005, hlm. 18) bahwa “istilah-istilah, konsep-konsep, atau kata-kata yang penting dan mengandung makna tertentu perlu diberi batasan atau definisi agar tidak menimbulkan salah penafsiran bagi pembacanya”. Adapun menurut Silalahi (2012, hlm. 120) “definisi operasional adalah definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk, kriteria, atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris”. Dengan demikian, kedudukan definisi operasional dalam sebuah penelitian sangat penting guna menghindari salah tafsir dari istilah atau konsep yang dikemukakan di dalamnya.

Mengingat pentingnya keberadaan definisi operasional tersebut, maka definisi operasional dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Kualitas hidup (*Quality of Life*) merupakan sebuah konsep yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada pendapat bahwa kondisi kehidupan manusia harus dievaluasi melalui indikator yang lebih luas dari hanya sebatas pendapatan. Dalam penelitian ini, kualitas hidup secara umum memiliki aspek-aspek tertentu seperti dikemukakan Rahardjo (dalam Muchlis, 2010, hlm. 19); Eurostat (2015) yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kesempatan kerja, keamanan sosial, ketersediaan sumber air bersih, pendidikan, rekreasi dan interaksi sosial, bangunan rumah, serta keterlibatan dalam organisasi politik dan ekonomi.
2. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2010). Dalam penelitian ini yang dimaksud penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Ngamprah.
3. Permukiman teratur adalah kelompok perumahan dengan tata letak bangunan yang teratur dan terencana yang terbentuk dan berkembang selaras dengan pola jaringan jalannya, serta dilengkapi penyediaan dengan prasarana dan sarana lingkungan (Badan Pertanahan Nasional, 2014). Dalam penelitian ini, perumahan teratur merupakan kelompok perumahan yang dikelola oleh pihak pengembang.
4. Permukiman tidak teratur adalah kelompok perumahan dengan tata letak bangunan yang tidak teratur dan kurang terencana yang terbentuk dan berkembang tidak selaras dengan pola jaringan jalannya, serta tidak dilengkapi penyediaan dengan prasarana dan sarana lingkungan (Badan Pertanahan Nasional, 2014). Dalam penelitian ini, permukiman tidak teratur merupakan kelompok perumahan yang tidak dikelola oleh pengembang tetapi tumbuh dan berkembang sendiri oleh masyarakat setempat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa cara sebagai berikut.

1. Wawancara (*Interview*)

Wiratha (2006, hlm. 227) mengemukakan bahwa wawancara (*interview*) adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai”. Teknik wawancara perlu untuk diterapkan dalam penelitian ini untuk menambah keakuratan data yang akan diperoleh. Adapun jenis wawancara yang akan dilakukan adalah kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara jenis ini, menurut Tika (2005, hlm. 52) “pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan, akan tetapi cara pengajuan atau penyajian pertanyaan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri”. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengurangi kelemahan dari jenis wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur.

2. Observasi

Wiratha (2006, hlm. 227) menjelaskan bahwa observasi (pengamatan) meliputi “kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera”. Dalam konsep ini, peneliti memaknai bahwa observasi dimaksudkan sebagai pengamatan langsung ke lapangan yang terstruktur dan dilakukan dengan menggunakan media penunjang seperti kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara ataupun pedoman pengamatan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai referensi terkait penelitian dengan tema kualitas hidup khususnya di daerah perumahan teratur yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang mengenai indikator kualitas hidup penduduk.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang memiliki data untuk penelitian. Dalam hal ini, studi

dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data-data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA, dan kantor Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten terkait.

H. Instrumen Penelitian

Menurut Biddix (2009, hlm. 1) instrumen penelitian adalah “*the generic term that researchers use for a measurement device (survey, test, questionnaire, etc)*”. Instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian disesuaikan dengan data yang ingin diperoleh. Adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, dan lembar dokumentasi.

1. Instrumen yang Digunakan

a. Lembar Observasi

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar cek (*checklist*). Menurut Tika (2005, hlm. 48) daftar cek merupakan “suatu daftar berisi nama objek atau fenomena-fenomena yang akan diteliti atau diamati”. Daftar cek ini diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara lengkap di lapangan dan mampu mengefektifkan waktu yang diperlukan dalam penelitian. Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini terlampir sebagai Lampiran 1.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara memiliki peranan penting untuk menentukan seberapa lengkap data yang akan diperoleh dalam penelitian. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan pendapat Kennedy (2006, hlm. 1) bahwa pedoman wawancara (*interview guides*) “*...help you know what to ask about, in what sequence, how to pose your questions, and how to pose follow-ups. They provide guidance about what to do or say next, after your interviewee has answered the last question*”. Pedoman wawancara berperan penting untuk membantu peneliti dalam memberikan pertanyaan lanjutan kepada responden secara terarah. Adapun

pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini terlampir sebagai Lampiran 2.

c. Lembar Dokumentasi

Lembar dokumentasi membantu peneliti dalam mengumpulkan ketersediaan data-data yang diperoleh dari pihak lain seperti instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, perpustakaan, arsip perorangan, dan lain sebagainya.

2. Pengembangan Kisi-kisi Instrumen

Pengembangan kisi-kisi instrumen dilakukan dengan menentukan variabel penelitian dan menurunkan setiap variabel menjadi indikator dan sub indikator. Selanjutnya setiap sub indikator dikelompokkan ke dalam jenis instrumen sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap berikutnya adalah menurunkan setiap sub indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dianggap relevan dan mewakili data yang ingin diperoleh. Kisi-kisi instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator		Jenis Instrumen		
			Dokumentasi	Observasi	Wawancara
Sebaran permukiman teratur	Koordinat geografis		√	√	
	Luas permukiman teratur		√	√	
Faktor-faktor yang mendukung berkembangnya permukiman teratur	Morfologi		√	√	
	Kerawanan bencana		√		
	Kondisi air dan drainase			√	
	Iklim		√	√	
	Aksesibilitas		√	√	
	Aturan pemerintah		√		
Kualitas hidup	Pendapatan	Besaran pendapatan			√
	Kesehatan	Angka sakit diare			√
		Angka sakit ISPA			√
		Jarak fasilitas kesehatan dan tenaga medis			√
		Frekuensi sakit			√
		Kepemilikan asuransi kesehatan			√
	Kemiskinan	Pengeluaran harian untuk makan		√	√
		Pengeluaran bahan bakar dan listrik			√

Lanjutan Tabel 3.6

	Pendidikan	Pendidikan formal terakhir			√
		Partisipasi dalam pendidikan informal			√
	Kesempatan kerja	Sektor pekerjaan (formal/informal)			√
		Lama kerja di sektor formal/informal			√
	Bangunan rumah	Jenis bangunan rumah yang dihuni (permanen/semi permanen/non permanen)		√	√
		Hak kepemilikan bangunan rumah			√
	Rekreasi dan interaksi sosial	Frekuensi rekreasi dalam 1 tahun terakhir			√
		Partisipasi dalam kegiatan rutin sukarela di masyarakat			√
		Keikutsertaan dalam organisasi/komunitas relawan			√
	Keamanan sosial	Aman/ tidak amannya lingkungan menurut penduduk			√
		Frekuensi kriminalitas			√
	Keterlibatan dalam organisasi politik, pemerintahan dan ekonomi	Partisipasi dalam pemilu			√
		Partisipasi dalam partai politik			√
		Partisipasi dalam lembaga pemerintahan			√
		Partisipasi dalam lembaga ekonomi			√
	Ketersediaan sumber air bersih	Sumber air bersih yang digunakan			√

Sumber: Hasil Analisis (2017)

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis tetangga terdekat, analisis deskriptif, skoring dan studi pustaka.

1. Analisis Tetangga Terdekat (*Nearest Neighbor Analysis*)

Analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu) yaitu sebaran permukiman teratur di Kecamatan Ngamprah adalah analisis tetangga terdekat. Analisis ini merupakan studi kualitatif untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran ruang atau wilayah tertentu.

Untuk mengetahui sebaran obyek geografi khususnya permukiman teratur digunakan skala tetangga terdekat (R). Skala R ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R = \frac{D_{obs}}{D_{exp}} = \frac{\frac{\sum r}{N}}{\frac{1}{2} \sqrt{p}} = \frac{\left(\frac{2\sqrt{N}}{L} \right) \sum r}{N}$$

Keterangan:

R = Skala tetangga terdekat

Dobs = Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga terdekatnya

Dexp = Rata-rata jarak ke tetangga terdekat yang diharapkan pada penyebaran secara random dari kepadatan p

p = Perbandingan antara jumlah titik tempat dengan luar wilayah yang diobservasi

r = Jarak tiap titik ke tetangga terdekatnya

L = Luas wilayah yang diobservasi

N = Jumlah titik tempat

Adapun menurut Hagget (dalam Nareswari, 2009) berdasarkan perhitungan ini dapat dibedakan penyebaran pola ruang atau wilayah menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Pola bergerombol (*Clustered Pattern*), jika nilai $R < 1$
- Pola acak (*Random Pattern*), jika nilai $R = 1$ atau R mendekati nilai 1
- Pola tersebar (*Scattered Pattern*), jika nilai $R > 1$

2. Analisis Deskriptif

Menurut Tika (2005, hlm. 4) mengemukakan bahwa “analisis deskriptif difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang

diteliti”. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan sebaran permukiman teratur di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan faktor-faktor yang mendukung berkembangnya permukiman teratur di wilayah tersebut baik berupa faktor fisik maupun sosial. Serta mendeskripsikan hasil temuan tentang kondisi kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur yang dijumpai di wilayah administratif Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

3. Skoring atau Pembobotan

Analisis skoring atau pembobotan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga tentang kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Untuk pengolahan data hasil survei, hal pertama yang harus dilakukan adalah pembobotan terhadap indikator-indikator yang ada. Dalam penelitian ini, metode pembobotan ditentukan berdasarkan penelitian Rahardjo (dalam Muchlis, 2010, hlm. 26). Pembobotan terhadap indikator yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti kesehatan dan pendidikan diberikan bobot 5 (lima) sedangkan indikator-indikator yang berkaitan dengan penggunaan tanah diberi bobot 3 (tiga). Untuk indikator-indikator lainnya yang tidak terkait IPM dan penggunaan tanah diberi bobot 1 (satu). Adapun tabel sebaran bobot setiap indikator kualitas hidup dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 Bobot per Indikator Kualitas Hidup

No.	Indikator	Bobot
1	Kesehatan	5
2	Pendidikan	5
3	Pendapatan	3
4	Kemiskinan	3
5	Bangunan rumah	3
6	Ketersediaan sumber air bersih	3
7	Kesempatan kerja	1
8	Rekreasi dan interaksi sosial	1
9	Keamanan sosial	1
10	Keterlibatan dalam organisasi politik, pemerintahan dan ekonomi	1

Sumber: Hasil Analisis, dimodifikasi dari Rahardjo (2005); Muchlis (2010)

Untuk menentukan tingkat kualitas hidup penduduk di sekitar permukiman teratur maka hasil skor pada tiap kuesioner dikalikan bobot masing-masing indikator kualitas hidup. Setelah itu kemudian seluruh indikator kualitas hidup dijumlahkan sehingga diperoleh angka kumulatif dari hasil perkalian skor dengan bobot. Nilai total yang telah dikumulatifkan selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) interval kualitas hidup yaitu rendah, sedang dan tinggi. Jika seluruh skor masing-masing indikator bernilai 1, maka diperoleh angka kumulatif 26. Sedangkan apabila seluruh skor pada tiap indikator bernilai 3, maka diperoleh angka kumulatif 78. Adapun secara lebih rinci, perhitungan skor tersebut dilakukan dengan cara berikut ini.

Skor total minimal = (skor minimal kesehatan x bobot kesehatan) + (skor minimal pendidikan x bobot pendidikan) + (skor minimal pendapatan x bobot pendapatan) + (skor minimal kemiskinan x bobot kemiskinan) + (skor minimal bangunan rumah x bobot bangunan rumah) + (skor minimal ketersediaan air bersih x bobot ketersediaan air bersih) + (skor minimal kesempatan kerja x bobot kesempatan kerja) + (skor minimal rekreasi dan interaksi sosial x bobot rekreasi dan interaksi sosial) + (skor minimal keamanan sosial x bobot keamanan sosial) + (skor minimal keterlibatan dalam organisasi politik, pemerintahan, dan ekonomi x bobot keterlibatan dalam organisasi politik, pemerintahan, dan ekonomi). Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Total Minimal} &= (1 \times 5) + (1 \times 5) + (1 \times 3) + (1 \times 3) + (1 \times 3) + (1 \times 3) + (1 \times 1) + \\
 &\quad (1 \times 1) + (1 \times 1) + (1 \times 1) \\
 &= 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 \\
 &= 26
 \end{aligned}$$

Sedangkan skor total maksimal = (skor maksimal kesehatan x bobot kesehatan) + (skor maksimal pendidikan x bobot pendidikan) + (skor maksimal pendapatan x bobot pendapatan) + (skor maksimal kemiskinan x bobot kemiskinan) + (skor maksimal bangunan rumah x bobot bangunan rumah) + (skor maksimal ketersediaan air bersih x bobot ketersediaan air bersih) + (skor maksimal kesempatan kerja x bobot kesempatan kerja) + (skor maksimal rekreasi dan interaksi sosial x bobot rekreasi dan interaksi sosial) + (skor maksimal keamanan

sosial x bobot keamanan sosial) + (skor maksimal keterlibatan dalam organisasi politik, pemerintahan, dan ekonomi x bobot keterlibatan dalam organisasi politik, pemerintahan, dan ekonomi). Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Total Maksimal} &= (3 \times 5) + (3 \times 5) + (3 \times 3) + (3 \times 3) + (3 \times 3) + (3 \times 3) + (3 \times 1) + \\
 &\quad (3 \times 1) + (3 \times 1) + (3 \times 1) \\
 &= 15 + 15 + 9 + 9 + 9 + 9 + 3 + 3 + 3 + 3 \\
 &= 78
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan kategori kualitas hidup penduduk di Kecamatan Ngamprah dengan membagi ke dalam 3 (tiga) interval, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Perhitungan yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Rentang klasifikasi} &= \frac{\text{Skor total maksimal} - \text{skor total minimal}}{\text{Jumlah kelas klasifikasi}} \\
 &= \frac{78-26}{5} \\
 &= \frac{52}{5} = 10,4 \text{ dibulatkan menjadi } 10
 \end{aligned}$$

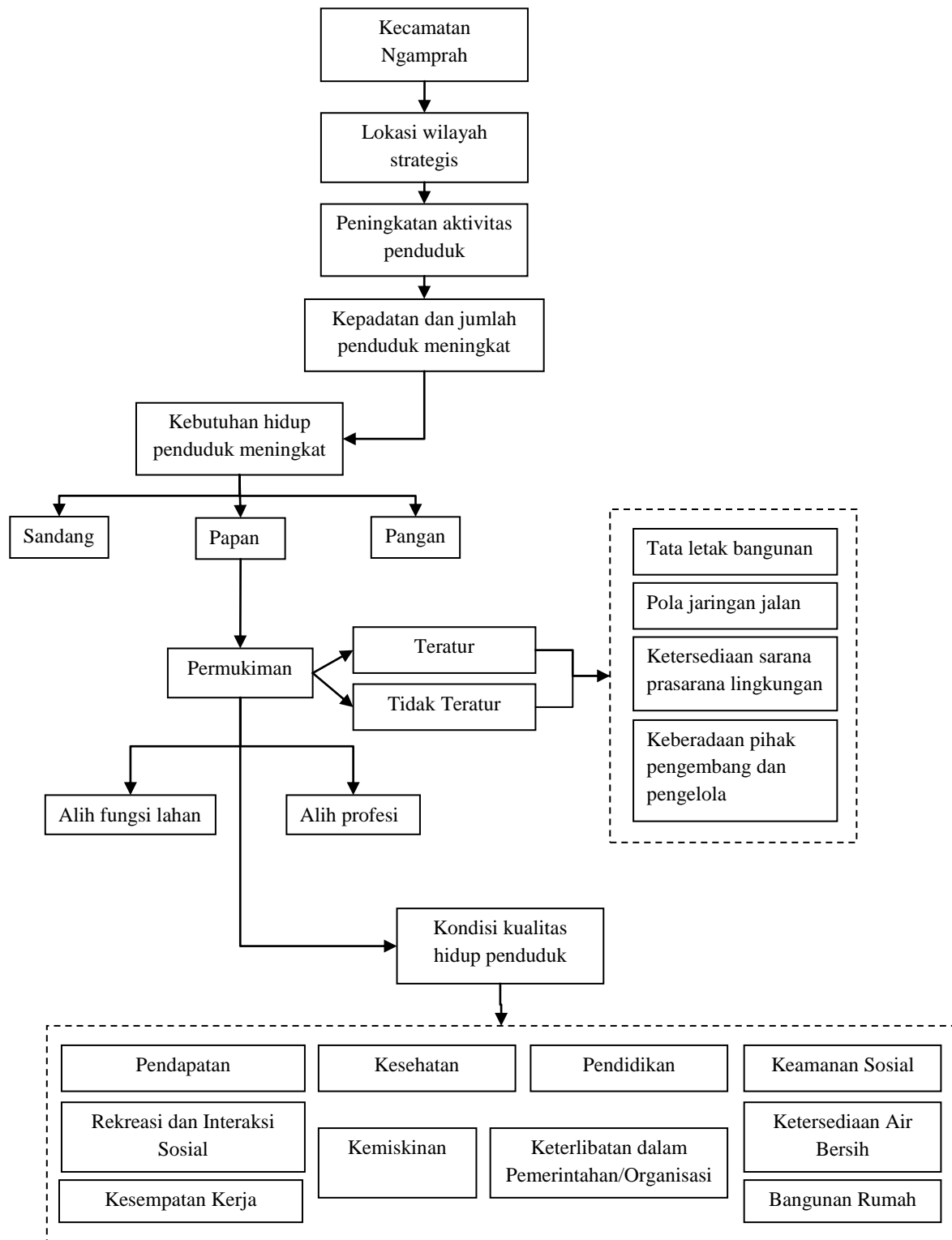
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori kualitas hidup penduduk pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Kualitas Hidup Penduduk

Persentase Kumulatif	Skor	Jumlah Skor x Bobot	Kategori Kualitas Hidup
0 – 35%	1	26 – 43	Rendah
36 – 70%	2	44 – 61	Sedang
71 – 100%	3	62 – 78	Tinggi

Sumber: Pengolahan data (2017), dimodifikasi dari Muchlis, 2010, hlm. 26

J. Kerangka Pemikiran



Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Penelitian (2017)